



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PENGUATAN LEMBAGA DESA MENUJU DESA MANDIRI DI DESA LIPATKAIN SELATAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

BIMA ALPAJRI

Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi.
Jl. Gatot Subroto KM7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan

Email : bimaalfajri@gmail.com

Abstarct

Village Government is the leading service unit for the community and is the main thing for the success of all programs. Therefore, strengthening the village is a necessity that cannot be postponed in an effort to realize community welfare as the goal of regional autonomy and village independence. The active involvement and seriousness of the local government is very much needed, both from the central government, local government, sub-district government, especially the role of the village government itself. While the task of the community, in addition to participating in development, is to watch village supervisors and performance, for this reason, continue to strengthen Community Institutions in the Village which can be carried out through placing Community Institutions in accordance with their functions. The implementation of community institutional organizations in the village must be supported by budgetary capabilities and the need for village development. This type of research is a qualitative descriptive study, the informants in this study were the Village Head, LPMD Chair, PKK Chair, Customary Head and Village Secretary. The data sources used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews (interviews) and documentation. If the Village Institution wants to be strong and independent, every work program that will be carried out by the Village Institution for HR must follow procedures, because within the HR Institution it must be strong and have potential.

Keywords: Strengthening Village Institutions.

Abstrak

Pemerintah Desa merupakan unit pelayanan terdepan bagi masyarakat dan merupakan hal utama bagi keberhasilan semua program. Oleh karena itu, penguatan desa merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditunda-tunda dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dan kemandirian desa. Keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, terutama peran pemerintah desa itu sendiri. Sedangkan tugas masyarakat selain ikut serta dalam pembangunan adalah mengawasi pengawas dan kinerja desa, untuk itu terus memperkuat Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dapat dilakukan dengan menempatkan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Penyelenggaraan organisasi kelembagaan masyarakat di desa harus didukung oleh kemampuan anggaran dan kebutuhan pembangunan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua LPMD, Ketua PKK, Kepala Adat dan Sekretaris Desa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. Jika Lembaga Desa ingin kuat dan mandiri,



maka setiap program kerja yang akan dilakukan oleh Lembaga SDM Di Desa harus mengikuti prosedur, karena di dalam Lembaga SDM itu harus kuat dan berpotensi.

Kata Kunci: Penguatan Lembaga Desa.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan public dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan public dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintah tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan.

Salah satu konsep membangun desa maju dan mandiri adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam Undang-Undang Desa ini, pemerintah ingin memberikan tempat yang memadai dan leluasa untuk desa dapat berkembang dengan sistem demokrasi agar desa dapat meningkatkan kesejahteraannya, agar terciptanya pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasankawasa lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Undang-Undang Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa di sini dijelaskan, “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Undang-Undang Desa menyebut dengan jelas tentang pengertian desa, prinsip dan tujuan pembangunan desa yang mengedepankan posisi desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Maka diperlukannya pembenahan dalam upaya peningkatan Desa karena hingga saat ini desa di pelosok masih ada desa-desa yang tertinggal.

Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi melalui pemberdayaan masyarakat Desa juga yang artinya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Kabupaten Kampar sendiri salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau. Disamping julukan sebagai *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Propinsi Riau. Kabupaten ini



memiliki luas 11.289,28 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau dan jumlah penduduknya berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 berjumlah 790.313 jiwa yang terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 Desa sebagai hasil pemekaran dari 12 Kecamatan sebelumnya. (Wikipedia).

Seperti halnya dengan Desa Tanah Merah kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar, meraih predikat desa Mandiri dari pemerintah daerah kabupaten Kampar. Dengan meraih desa Mandiri berarti desa Tanah Merah sudah selangkah lebih maju dari pada desa yang lainnya, yang ada di kabupaten Kampar dan juga Propinsi Riau. Meraih predikat desa Mandiri bukanlah hal yang mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya desa harus mengisi indeks desa membangun, langsung dilaporkan ke Kementerian Pedesaan Republik Indonesia. Dengan mengetahui Desa Tanah Merah telah mendapatkan predikat, peneliti tertarik untuk melihat atau ingin mengetahui apakah Desa Lipatkain Selatan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri bisa menjadi Desa yang mandiri (harianwartal).

Sebelumnya penulis akan membahas terlebih dahulu, apa itu desamandiri?. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu:

1. kebutuhan dasar.
2. pelayanan dasar.
3. Lingkungan.
4. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa. Khususnya terhadap pembangunan desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakat.

Pembuatan peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang mempunyai konsekuensi kepada daerah untuk menggali potensi, terutama fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang sebenarnya merupakan suatu cara untuk memeratakan hasil pembangunan dengan menonjolkan partisipasi seluruh masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.



2. Melaksanakan mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan dinamika masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan desa, LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Keberhasilan Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Adapun masalah yang ada di desa tersebut adalah:

1. Kurangnya dukungan dari lembaga desa lainnya dan partisipasi masyarakat.
2. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Kurangnya kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pemerintah desa khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Terkait dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis bisa mengidentifikasi masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah penguatan Lembaga desa menuju desa mandiri di desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya yaitu: “Untuk mengetahui Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar” khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis(Keilmuan)



Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur dan menjadi sarana pengembangan teori ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam manajemen sumber daya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Kata administrasi berasal dari bahasa latin *administrare* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengertian yang luas administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Administrasi Negara secara umum adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah/ aparaturnegara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi Negara adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Administrasi Negara juga bisa diartikan sebagai proses penyelenggaraan kepentingan dan masalah bersama, penyelenggaraannya, organisasinya, dan sebagainya. Administrasi mencakup perumusan kebijakan, kelembagaan, dan implementasi dari kebijakan untuk merespon masalah dan kepentingan publik.

Ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari pada sistem dan aparaturnegara.

Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 :23).

2.1.2 Teori MSDM

Menurut Simamora (dalam Sutrisno, 2009:3) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Sementara itu Schuler, (dalam Sutrisno, 2009:6) mengartikan manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan - tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ardana, (2012:5) manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan pergerakan, pengorganisasian dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan.



Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar semua potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan.

Fokus manajemen sumber daya manusia ini terletak pada upaya mengelola sumber daya dalam semangat interaksi antara organisasi dan pekerja yang sering kali memiliki kepentingan yang berbeda.

Jadi manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.

2.1.3 Teori Manajemen SDM

Sumber daya manusia didalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peran yang sangat penting. Pengelolaan, perencanaan dan pengorganisasian dilingkungan perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk menjalankan prosesnya. Sumber daya manusia atau karyawan adalah aset perusahaan yang penting untuk di perhatikan perusahaan sekaligus harus di jaga sebaik mungkin.

Melihat kondisi diatas manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi, tugas dan keadaan sumber daya manusia atau karyawan di dalam sebuah perusahaan.

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15) menyatakan bahwa “Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal”.

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia menurut Bintoro dan Daryanto (2017:20) kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa fungsi.

Fungsi perencanaan (planning) merupakan fungsi penetapan program-program pengelolaan sumber daya manusia yang akan membantu pencapaian tujuan perusahaan.

Fungsi pengorganisasian (organizing) merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antar para pekerja dan tugas – tugas yang harus dikerjakan, termasuk menetapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Fungsi pengarahan (directing) merupakan fungsi pemberian dorongan pada para pekerja agar dapat dan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Fungsi Pengendalian (Controlling) Merupakan fungsi pengukuran, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja telah dicapai.

2.1.4 Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya pemerintah dan masyarakat desa untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan semua aspek kehidupan desanya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi sebuah desa. Adapun untuk pembangunan desa meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembangunan



Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Ini adalah persoalan yang menyangkut sampai berapa jauh informasi yang kita miliki mengenai pembangunan, apabila kita tidak mengerti arti inti dari pembangunan itu.

Menurut Todaro (1997:103) menyatakan bahwa: pembangunan haruslah diarahkan kembali sebagai suatu serangan terhadap kebusukan atau kejahatan dunia sekarang. Kekurangan makanan yang sehat atau yang bergizi, penyakit, buta aksara, kemunduran-kemunduran, pengangguran dan ketimpangan atau ketidakadilan. Jika diukur dari tingkat pertumbuhan secara keseluruhan, pembangunan telah mencapai sukses yang besar, akan tetapi jika ditinjau dan dikaji dari segi pekerjaan, keadilan dan penghapusan kemiskinan, maka pembangunan itu mengalami kegagalan atau kalaupun sukses hanyalah sebagian kecil saja.

Tiap-tiap negara mengejar pembangunan adalah suatu tujuan bahwa semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang.

Karena itu, pembangunan seharusnya diselediki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan social. Sebagai tambahan, terhadap perbaikan-perbaikan dibidang penghasiian dan output, khususnya diadakan perombakan-perombakan yang radikal dalam lembaga-lembaga, struktur dan administrasi, begitupun dalam sikap-sikap mental dan bahkan banyak pula yang harus merubah adat kebiasaan dan kepercayaan. Akhirnya walaupun pembangunan itu biasanya ditetapkan atau diarahkan dalam konteks nasional, realisasinya yang luas bias memaksa modifikasi fundamental ekonomi internasional, begitupun sistem sosialnya. Akan tetapi, sebelum mengadakan Analisa mengenai kompleksitas pembangunan, kita mulai dulu dengan membahas dua macam pendekatan konseptual yang penting mengenai studi atau telaah pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan meninjau kembali dua pengertian yang penting, yaitu dualisme dan masyarakat ganda.

Pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem social ekonomi, sikap masyarakat dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan sehingga pembangunan adalah proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberika berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian (1994:105) memberikan pengertian pembangunan adalah “ usaha yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalm rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Todaro (1997:128) menyebutkan apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyarakat haruslah mempunyai paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut:



- a. Mempersiapkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bias hidup seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, semua itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata-mata, tetapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula organisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi, pertama-tama mengutamakan peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok. Disamping itu diutamakan pula adalah untuk menghapus kemelaratan khususnya dalam hal kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dalam menanggulangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat.

Untuk itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa. Pendekatan (*top down*) dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintah. Pendekatan (*bottom up*) dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2. Perencanaan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson (Conyers , 1994: 4) pada hakekatnya perencanaan adalah “usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan Nehru (Conyers, 1994:4) menyatakan bahwa perencanaan adalah “suatu bentuk latihan intelejensia guna mengolah fakta serta situasi sbagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah”.



Benhakker (Conyers, 1994: 4) menyatakan bahwa perencanaan adalah “seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang agar dapat terlaksanakan”. Selain itu diungkapkan juga yang menyebutkan bahwa secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian secara tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang perencanaan, penulis mensintesis bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang semaksimal mungkin guna mencapai tujuan- tujuan tertentu dimasa depan.

Menurut (Widjaja, 2003: 83) perencanaan pembangunan desa juga termuat dalam otonomi daerah yaitu:

- a. Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman.
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah Kabupaten. Dengan demikian desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.
- c. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.
- d. Keadaan dan masalah yang dihadapi antara lain: peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan belum lengkap, fasilitas pemerintah sering terlambat, kualitas eksekutif dan legislatif terbatas, daerah kekurangan referensi, culture shock (daerah-isme), formulasi perimbangan keuangan antara daerah dengan desa tidak ada dan terjadi expenditure yang tidak rasional, inkonsistensi aturan dan kewenangan, kualitas SDM penyelenggara pemerintah desa dan kuantitas sarana serta prasarana kerja terbatas.

Definisi lain dikemukakan oleh para ahli manajemen dalam buku yang ditulis oleh G.R. Terry (Malayu, 1998: 92) mengatakan perencanaan adalah “memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mnggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Scaffer (Conyers, 1999: 4) mengemukakan bahwa “apapun yang terlintas dibenak kita



manakala kita membicarakan perencanaan kiranya tidak terlepas dari kaitan persoalan pengambilan keputusan”. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diuraikan beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan) dan waktu (kapan, bagaimana kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Koontz dan O’Donnel (Malayu, 1993: 92), perencanaan adalah “fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada”. Sedangkan Louis A. Allen (Malayu,1993:92) mengemukakan bahwa perencanaan adalah “menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

3.Perencanaan Desa

Perencanaan desa adalah perumusan tujuan, kebijakan, dan pelayanan desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Pelayanan Desa terdiri dari struktur organisasi dan tugas pemerintah desa. Pelayan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yakni terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Sekretaris desa adalah salah satu perangkat desa yang bertugas mengurus administrasi didesa. Misalnya, membuat surat kelahiran atau surat keterangan. Pelayanan desa bertujuan untuk menyelenggarakan subsistem pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Desa dapat juga melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan. Sehingga didesa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sesuai dengan kebutuhan desa. LPMD merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. LPMD mempunyai program untuk memaksimalkan perencanaan pelayanan desa.

Menurut R.H UnangSoenardjo (HanifNurcholis,2011:4)menyebutkan bahwa:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I Nyoman Beratha (Hanif Nurcholis, 2011: 4) memaparkan bahwa:



Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dipemerintahan kabupaten/ kota.

Pelaksanaan perencanaan pelayanan desa dilakukan oleh kepala desa sekretaris desa, BPD dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah desa akan tercapai apabila saling dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada studi ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

3.2 Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pelayanan, keterangan atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan. Informan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia KUA Kecamatan Singingi sebanyak 5 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| No | Informan | Jumlah | | | | |
|--------|----------|--------|--|--|--|--|
| 1 | | 1 | | | | |
| 2 | | 2 | | | | |
| 3 | | 2 | | | | |
| Jumlah | | 5 | | | | |

3.3 Sumber Data

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus LPMD, Pengurus Desa dan warga masyarakat Desa Lipatkain Selatan kecamatan Kampar Kiri. Untuk mendukung keabsahan data peneliti melakukan triangulasi data. Sedangkan objek penelitiannya adalah Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Lipatkain Selatan Mandiri.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

3.5 Metode Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

3.5.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung untuk dijadikan data yang tidak diperoleh dari sumber data yang lain. Dilakukan wawancara mendalam dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana peneliti menggunakan teknik mengikat dan disesuaikan dengan keadaan saat itu guna mendapatkan data yang sebanyak mungkin dari informan sebagai sumber data dengan cara mencatat atau merekam hasil wawancara tersebut.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap fenomena objek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data. Teknik ini dilakukan karena untuk mencari dan mendapatkan “sesuatu” diluar atau tidak mungkin diperoleh dari sumber data langsung, sehingga dapat diharapkan nilai data yang diterima melalui pengamatan langsung akan memberikan kekuatan pandangan tentang nilai atau validalitas data tersebut, sebagai pembandingan dari sumber data baku yang sudah ada.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data berupa informasi terkait pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan yang dapat ditemukan melalui media elektronik serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Analisis dilakukan pada saat wawancara, ketika jawaban yang diberikan informan belum memuaskan dan menjawab tujuan penelitian. Pertanyaan dilanjutkan sampai tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh.

Reduksi data (Data reduction) yang merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Penyajian data (Data display) Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat



penyajian-penyajian maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih baik menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Penarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka, tetapi semakin lama lebih semakinrinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dilapangan dan mengakar dengan kokoh. Data yang diperoleh dilapangan, disajikan sedemikian rupa, kemudian dianalisa terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

3.7 Kerangka Pemikiran

Desa Lipatkain Selatan merupakan salah satu desa dikecamatan Kampar Kiri yang maju dalam bidang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa. Pengaruh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi sangat membantu didalam aspek kehidupan, sehingga mempengaruhi partisipasi untuk terjun secara langsung kepada pemerintah desa yang hanya melaksanakan tugas pokok dari pemerintah pusat. Untuk menunjang pembangunan desa maka masyarakat juga ikut ambil bagian didalam pelaksanaan dan penilaian hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah desa.

1. Akses Sumber Daya
2. Akses Teknologi
3. Akses Pasar
4. Akses Pembiayaan

3.8 Defenisi Operasional

1. Administrasi Negara adalah merupakan kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan. Menyeleksi pelatih menggambarkan kegiatan memilih pelatih dalam melakukan kegiatan pelatihan atau pengembangan, keahlian tentang subjek tidak menjamin bahwa seseorang individu akan dapat menjadikannya sebagai pelatih yang efektif.
2. MSDM adalah merupakan kegiatan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.
3. Pemerintah Desa adalah pemerintahan desa dan pemerintah desa, pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa an badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Mempersiapkan Penguatan Lembaga adalah peranan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa merupakan domain terpenting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.



4. Gambaran Uum Lokasi Penelitian

4.1 Latar Belakang Kenegerian Lipatkain

Adalah salah satu dari enam Negeri tua di wilayah Rantau Kampar Kiri Kabupaten Kampar, daerah ini sudah berdiri semenjak kerajaan Gunung Sahilan berkuasa di Rantau Kampar Kiri dari abad ke 16 sampai dengan runtuhnya pada tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka Kenegerian Lipatkain merupakan ibu kota dari kewedanaan Kampar Kiri, pada tahun 1981 Kenegerian Lipatkain berubah status menjadi Desa Lipatkain dan menjadi ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Satu tahun kemudian tahun 1982 Desa Lipatkain berupa status menjadi Kelurahan Lipatkain. (Marlaili Rahim : 1985). Pada tahun 1999 kecamatan Kampar Kiri dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kemudian pada tahun 2004 Kecamatan Kampar Kiri sebagai Kecamatan Induk Kembali dimekarkan menjadi tiga kecamatan lagi yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Gunung Sahilan, dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

Bersamaan dengan pemekaran Kecamatan ini, Kelurahan Lipatkain juga dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Lipatkain Utara, Desa Lipatkain Selatan, Kelurahan Lipatkain, Desa Sungai Paku, dan Desa Sungai Geringging. (Kampar Kiri Dalam Angka 2010). Kenegerian Lipatkain merupakan suatu komunitas Hukum adat yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar . Pada wilayah hukum adat Kenegerian Lipatkain hari ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari lima desa yaitu :

1. Desa Lipatkain Selatan.
2. Desa Lipatkain Utara.
3. Kelurahan Lipatkain.
4. Desa Sungai Paku.
5. Desa Sungai Geringging.

4.2 Sejarah Kenegerian Lipatkain

Dalam tomo adat Kenegerian Lipatkain yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi disebutkan bahwa, pada zaman dahulu kala datanglah dua orang datuk kedaerah Lipatkain secara bersamaan yaitu datuk pertama bernama Datuk Sutan Lawik Api beliau, datang dengan perahu dari selat Malaka mudik ke Sungai Ombun (Batang Kampar Kiri) dan singgah (maontak Gala, membuang sauh) di daerah yang sekarang Lipatkain. Ditepi sungai tersebut Datuk Sutan Lawik Api Manundo Kapae Sosak, Malambe (menebas) Kalimunting membuat ladang dan kebun. Tidak jauh disebelah hulu sungai datang pula seorang Datuk dari hulu sungai Kampar Kiri yaitu dari daerah Gunung Merapi (Pagaruyung) yaitu Datuk Godang menghilir dari hulu dan singgah membuat ladang dan kebun pula.

Kemudian disaat kedua Datuk tadi berburu binatang, dan menggumpulkan makanan dihutan(foodghatering). Maka berjumpalah mereka berdua, maka terjadilah dialog diantara keduanya tentang siapa yang dahulu datang di daerah Lipatkain ini. Masing-masing datuk mengakui dirinya yang dahulu datang dan berhak atas daerah Lipatkain dengan menunjukkan tanda-tanda masing-masing.



Setelah menunjukkan bukti masing-masing ternyata kedua datuk memang datang bersamaan, sehingga mereka bersepakat untuk tinggal bersama-masa membangun kampung, dan ladang serta membuat janji persaudaraan layak nya adik dan kakak. Disaat kedua datuk sedang berburu di atas sebuah bukit, mereka melihat asap api yang sangat besar di daerah aliran sungai Singingi. Maka kedua Datuk kedaerah berangkat menyusuri sungai Singingi melihat apa gerangan yang terjadi. Didaerah Singingi kedua datuk menemui kampung yang tengah terbakar dan mayat-mayat yang berserakan, rupanya daerah Singingi diala (diserang Garuda), maka terjadilah pertempuran antara Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang dengan Garuda, sehingga Sang Garuda dapat dibunuh. Setelah Garuda dapat dibunuh, datuk-datuk tersebut mendengar tangisan anak kecil diantara reruntuhan rumah yang hancur diamuk Garuda. Direruntuhan rumah tersebut Sang Datuk menemukan seorang gadis kecil yang selamat. Maka gadis kecil tersebut di bawah ke Kampung Lipatkain dan dibesarkan oleh kedua orang datuk tersebut. Setelah berlalunya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun berganti. Maka gadis kecil yang bernama “Puti Majo” beranjak remaja dan dewasa maka tampilkan kecantikan dan rupawan nya sang Putri. Melihat paras yang rupawan maka jatuh hatilah kedua datuk pada Puti Majo, maka jadilah perselisihan tentang siapa yang berhak untuk mengawini Sang Putri.

Puncak dari persingan antara kedua Datuk, maka terjadilah pertarungan antara keduanya, setelah sekian lama bertarung, saling adu kesaktian, rupanya kedua datuk sama-sama pendekar dan tidak ada yang menang dan kalah. Setelah lelah bertarung maka dibuatlah kesepakatan untuk bersama-sama meninggalkan Kampung dan meninggalkan Puti Majo sendirian. Datuk Godang lari keseberang Kampung dan menetap disana, sedangkan Datuk Sutan Lawik Api lari ke hulu Batang Olang dan menetap pula disana. Tidak lama berselang maka datanglah Datuk Sinaro kedaerah Lipatkain dari pesukuan Mandailing/Maliling, di daerah Lipatkain tersebut.

Datuk Sinaro menemui seorang gadis menagis sendirian. Gadis tersebut adalah Puti Majo, Puti Majo menceritakan kisah tentang kedua Kakak angkat nya yaitu Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang yang berselisih dan meninggalkan Kampung karena memperebutkan dirinya. Dan meminta Datuk Sinaro untuk menjemput keduanya kembali ke Kampung. Maka Datuk Sinaro berhasil membujuk kedua datuk untuk kembali kekampung Lipatkain dan memperdamaikan keduanya. Maka dibuatlah kesepakatan bahwa Datuk Sutan Lawik Api, Datuk Godang dan Puti Majo adalah bersaudara dan tidak boleh saling menikahi hal ini juga berlaku bagi anak keturunan mereka hingga hari ini (Cilampung pata baendiak sutonyo batali juo). Maka Puti Majo dinikahi oleh Datuk Sinaro maka Datuk Sinaro menjadi simondo dari Datuk Sutan Lawik Api dan Datuk Godang.

Maka dibagilah kekuasaan diantara datuk-datuk tersebut dimana Datuk Sutan Lawik Api adalah Pemilik Rantau, Datuk Godang Pemilik tanah Ulayat dan Puti Majo Pemilik Negeri, sehingga ketiga datuk adalah penguasa dinegeri Lipatkain dengan sebutan (Datuk Batigo). Sedangkan Datuk Sinaro adalah Suluh Negeri (Andiko Besar). Maka dibuatlah sebuah Negeri dengan nama Negeri Bungo Setangkai, inilah nama awal dari negeri Lipatkain. Kemudian datanglah beberapa suku lagi kenegeri Bungo Setangkai yaitu suku Melayu Palokoto, Suku Melayu Bendang, suku Nelayu nan ompek, suku Domo, sehingga negeri Bungo Setangkai didiami oleh delapan suku sehingga berdirinya kerajaan Gunung Sailan. Pada masa kerajaan Gunung Sahilan terjadilah perkara yang tak selesai-selesai di negeri Bungo Setangkai dimana negeri terbelah menjadi dua praksi besar delapan suku terpecah



menjadi dua golongan yang masing masing kokoh pada pendiriannya. Sehingga setiap persoalan tidak bisa diambil kata sepakat. Persoalan ini sampai kepada Raja Gunung Sailan, maka raja mengambil keputusan untuk menempatkan keturunannya dari suku Piliang untuk menetap di Lipatkain sebagai penengah dari delapan suku yang berselisih. Sehingga negeri Lipatkain terdiri dari sembilan suku.

5. Hasi Penelitian dan Pembahasan

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat di peroleh berbagai data dari informan yang berjumlah 4 orang dalam kaitannya dengan Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan di uraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait terhadap Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat Pendidikan.

5.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase % |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Laki-laki | 3 | 75% |
| 2 | Perempuan | 1 | 25% |
| Jumlah | | 4 | 100 % |

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2022.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan akhir tentang Penguatan Lembaga Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berperan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Suber Daya Manusia,
2. Meningkatkan Teknologi yang Lebih Canggih.
3. Lebih Banyak melakukan Promosi dan Sosialisasi.
4. Menggunakan Anggaran secara baik dengan mekanisme yang ada.

6.2 Saran



Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik, adapun saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Desa perlu digali lebih mendalam melalui beberapa pandangan lain yang lebih luas dan waktu penelitian yang lebih panjang serta pentingnya melakukan pendekatan dengan informan agar data yang ditemukan dapat lebih mendalam.
2. Peran Lembaga Desa ini diraih dengan penelitian kualitatif, maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif guna mendapatkan jawaban secara signifikan dari tujuan Lembaga Desa dengan peran yang dijalankan.
3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada sekedar menemukan peran Lembaga Desa namun bisa sampai menciptakan hal-hal maupun temuan-temuan yang baru untuk peningkatan Lembaga Desa. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini menjadi bahan cambukan ataupun masukan kepada Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat agar menjalankan dan memanfaatkan dengan baik Lembaga Desa guna terciptanya kesejahteraan Masyarakat dan Desa. Dan perlu juga diadakan pelatihan bagi para pelaksana Lembaga agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi dan tentu ini akan sangat membantu pelaksanaan kinerja yang baik.
4. Meningkatkan pengelolaan Lembaga dengan menggunakan system akuntansi sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga Desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas perkembangan Lembaga sehingga perkembangan Lembaga dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Lipatkain Selatan, agar lebih meningkatkan unit kegiatan usaha sehingga meningkatkan pendapatan Lembaga dan dapat disalurkan ke kas Desa Lipatkain Selatan sehingga peran Lembaga Desa Lipatkain Selatan lebih terlihat.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin, dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Chandler dan Plano. 2004. dalam Yeremias T.Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Medi. Yogyakarta.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Juliantara, Dadang. (2004). *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.
- Michael, Todaro. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Cetakan ketiga. CV. Alfabeta, Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. CV ALFABETA, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Widjaja, Prof. Drs. HAW.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.